

# Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan di Indonesia Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis Mengenai Dampak dan Tantangan Tatakelola Sekolah

**Fahmi<sup>1</sup>**

Program Sudi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan Palembang  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia  
Email: [fahmiuin@radenfatah.ac.id](mailto:fahmiuin@radenfatah.ac.id)

**Ardiansyah<sup>2</sup>**

Program Sudi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan Palembang  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia  
Email: [ardiyessi12@gmail.com](mailto:ardiyessi12@gmail.com)

**Okta romadhon<sup>3</sup>**

Program Sudi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan Palembang  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia  
Email: [oktaromadhon24@gmail.com](mailto:oktaromadhon24@gmail.com)

**Reza Andesta<sup>4</sup>**

Program Sudi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan Palembang  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia  
Email: [rezaandsta03@gmail.com](mailto:rezaandsta03@gmail.com)

**Adinda Nur Hasanah<sup>5</sup>**

Program Sudi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan Palembang  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia  
Email: [adindanurhasanah05@gmail.com](mailto:adindanurhasanah05@gmail.com)

## Abstract

### History Artikel:

Diterima 01 Mei 2026  
Direvisi 25 Mei 2026  
Diterima 10 Juni 2026  
Tersedia online 20 Juni 2026

*This study aims to analyze the impacts and challenges of educational decentralization and autonomy on school governance in Indonesia. The research employed a Systematic Literature Review (SLR) with a descriptive qualitative approach. Data were collected from relevant scientific articles and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that educational decentralization contributes to improved school autonomy, decision-making effectiveness, transparency, accountability, community participation, and educational innovation through School-Based Management (SBM). However, challenges remain, including disparities in regional capacity, limited human resources, weak supervision systems, and coordination issues between central and local governments. The study concludes that strengthening institutional capacity, educational leadership, and governance systems is essential for the successful implementation of educational decentralization in Indonesia.*

**Keywords:** *educational decentralization, educational autonomy, school governance, school-based management, systematic literature review.*

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola yang mengatur

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks global, reformasi tata kelola pendidikan menjadi agenda penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, melakukan transformasi kebijakan pendidikan melalui pendekatan desentralisasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Indah, 2024).

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan bagian dari reformasi administrasi publik yang berkembang sejak era Reformasi 1998. Kebijakan ini dilandasi oleh semangat otonomi daerah yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kebijakan tersebut, sebagian kewenangan yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai urusan publik, termasuk sektor pendidikan. Landasan hukum utama pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia tercermin dalam Undang-undang Indonesia (2014), tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang membutuhkan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pendidikan, dan daya saing daerah.

Implementasi desentralisasi pendidikan kemudian melahirkan konsep otonomi pendidikan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu model pengelolaan yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Model ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan pendidikan (Rizka, 2025).

Secara konseptual, desentralisasi pendidikan diyakini mampu meningkatkan kualitas tata kelola sekolah melalui penguatan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Sekolah memperoleh fleksibilitas dalam menyusun program, mengembangkan inovasi pembelajaran, serta mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah (Indah, 2024). Dengan demikian, kebijakan desentralisasi diharapkan mampu menghasilkan layanan pendidikan yang lebih relevan dan berkualitas dibandingkan sistem yang bersifat sentralistik. Perbedaan kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan manajerial lembaga pendidikan menyebabkan efektivitas pelaksanaan otonomi pendidikan bervariasi antarwilayah. Beberapa daerah mampu memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sementara daerah lainnya masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan pendidikan.

ketimpangan kapasitas daerah, tantangan lain yang sering ditemukan adalah lemahnya sistem pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masih terbatasnya kompetensi kepemimpinan pendidikan di tingkat sekolah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan dan menghambat terciptanya tata kelola sekolah yang efektif. Oleh sebab itu, keberhasilan desentralisasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pelimpahan kewenangan, tetapi juga oleh kesiapan institusi dalam mengelola kewenangan tersebut secara profesional dan akuntabel (Sui-Ni, 2023).

Dalam perkembangannya, penelitian mengenai desentralisasi dan otonomi pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berbagai studi telah mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan pendidikan, manajemen berbasis sekolah, partisipasi masyarakat, hingga efektivitas tata kelola lembaga pendidikan. Akan tetapi, hasil penelitian

yang ada masih menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menyoroti dampak positif berupa peningkatan inovasi dan partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa desentralisasi juga berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian terkait desentralisasi dan otonomi pendidikan di Indonesia melalui proses identifikasi, evaluasi, dan sintesis berbagai hasil penelitian yang relevan. Pendekatan SLR memungkinkan peneliti mengintegrasikan temuan-temuan empiris yang tersebar dalam berbagai publikasi ilmiah sehingga diperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai dampak dan tantangan tata kelola sekolah dalam konteks desentralisasi pendidikan (Brereton, 2007).

Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang diperoleh dari berbagai basis data dikumpulkan dan diinventarisasi. Selanjutnya dilakukan proses screening berdasarkan judul dan abstrak untuk menyeleksi artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Artikel yang lolos tahap penyaringan kemudian dianalisis secara mendalam melalui pembacaan teks lengkap untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi. Artikel yang memenuhi seluruh persyaratan selanjutnya ditetapkan sebagai sumber data dalam proses sintesis literatur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan ekstraksi informasi dari setiap artikel yang terpilih. Data yang dikumpulkan meliputi nama penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode penelitian, objek penelitian, serta temuan utama yang berkaitan dengan dampak dan tantangan desentralisasi pendidikan terhadap tata kelola sekolah. Seluruh data kemudian disusun dalam matriks literatur untuk mempermudah proses analisis dan perbandingan antar penelitian (Page, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis). Tahap analisis dimulai dengan membaca secara menyeluruh artikel yang telah terpilih, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil penelitian. Tema-tema tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu dampak desentralisasi dan otonomi pendidikan terhadap tata kelola sekolah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Proses sintesis dilakukan dengan membandingkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan berbagai temuan penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia (Snyder, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### 1. Karakteristik dan Tren Penelitian Desentralisasi Pendidikan di Indonesia

*”Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur yang telah ditelaah, ditemukan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan salah satu kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip otonomi daerah, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam sektor pendidikan, desentralisasi diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk mengelola*

*berbagai aspek pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.”*

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa implementasi desentralisasi pendidikan telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Sebelum diterapkannya kebijakan desentralisasi, hampir seluruh keputusan pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat, mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga pengembangan kurikulum. Setelah kebijakan desentralisasi diterapkan, sekolah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Alya & Hastuti, 2025).

Berbagai penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa bentuk implementasi desentralisasi yang paling dominan adalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui MBS, sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Kepala sekolah diberikan ruang yang lebih luas untuk merancang program sekolah, mengembangkan inovasi pembelajaran, mengelola anggaran, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan pendidikan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi pendidikan telah meningkatkan peran sekolah sebagai organisasi yang lebih mandiri. Sekolah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang mampu menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan sekitar. Kondisi ini memberikan peluang bagi sekolah untuk mengembangkan berbagai program unggulan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing (Arifin, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi pendidikan mendorong tumbuhnya budaya partisipatif dalam pengelolaan sekolah. Guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pendidikan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Beberapa penelitian juga menemukan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan belum berjalan secara optimal di seluruh daerah. Masih terdapat perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola pendidikan yang disebabkan oleh variasi kualitas sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, serta kemampuan manajerial lembaga pendidikan. Akibatnya, efektivitas implementasi desentralisasi pendidikan menunjukkan hasil yang berbeda-beda antarwilayah.

## **2. Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan dalam Tata Kelola Sekolah**

*”Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, ditemukan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan sejumlah dampak positif terhadap tata kelola sekolah. Dampak positif yang paling sering ditemukan dalam berbagai penelitian adalah meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, sekolah dapat mengambil keputusan secara lebih cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan sekolah merespons berbagai kebutuhan dan permasalahan pendidikan secara lebih tepat dan efisien.”*

Penelitian yang dikaji juga menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan meningkatkan fleksibilitas sekolah dalam mengelola sumber daya pendidikan. Sekolah memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, mengembangkan

program pembelajaran, serta mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan yang ada. Fleksibilitas tersebut memberikan peluang bagi sekolah untuk menciptakan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Ummaroch et al., 2026).

Berbagai penelitian menemukan bahwa desentralisasi pendidikan berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui komite sekolah dan berbagai forum partisipatif lainnya, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Partisipasi tersebut menciptakan hubungan yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan dukungan terhadap program-program pendidikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program pendidikan mendorong sekolah untuk lebih terbuka dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan anggaran. Transparansi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kreativitas dan inovasi sekolah dalam mengembangkan program pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki otonomi lebih besar cenderung lebih aktif dalam mengembangkan program unggulan, menciptakan metode pembelajaran inovatif, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan (Ridwan & Sumirat, 2021).

Temuan lain yang cukup penting adalah meningkatnya kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Dalam sistem pendidikan yang terdesentralisasi, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Kondisi tersebut mendorong kepala sekolah untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pendidikan.

### **3. Dampak Desentralisasi terhadap Tata Kelola Sekolah**

*"Berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian yang telah ditelaah, desentralisasi pendidikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tata kelola sekolah di Indonesia. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan telah mengubah pola pengelolaan sekolah menjadi lebih mandiri, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola sekolah yang sebelumnya cenderung bersifat sentralistik mengalami perubahan menuju sistem yang memberikan ruang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya, merencanakan program, serta mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal."*

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu dampak positif desentralisasi pendidikan adalah meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, sekolah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada instruksi pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan. Kepala sekolah bersama guru dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta kondisi lingkungan sekolah. Kondisi ini memungkinkan berbagai program pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel dan efisien.

Berbagai penelitian juga menemukan bahwa desentralisasi pendidikan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Melalui keterlibatan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi program pendidikan, pengelolaan sumber daya sekolah menjadi lebih terbuka. Setiap kebijakan

yang diambil dapat diawasi oleh berbagai pihak sehingga mendorong terciptanya tata kelola yang lebih bertanggung jawab. Transparansi tersebut juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan (Dewi et al., 2025).

Selain meningkatkan transparansi, desentralisasi pendidikan juga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi berperan sebagai penerima layanan pendidikan semata, tetapi turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan program sekolah, hingga pemberian dukungan terhadap berbagai kegiatan pendidikan. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola sekolah yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan pendidikan. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, sekolah dapat merancang program unggulan, mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi tersebut menjadi salah satu bentuk adaptasi sekolah terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Dari aspek kepemimpinan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan mendorong kepala sekolah untuk memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. Kepala sekolah dituntut untuk mampu merencanakan program pendidikan, mengelola sumber daya manusia, mengelola keuangan sekolah, serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi manajerial dan kepemimpinannya.

Meskipun demikian, hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa dampak desentralisasi pendidikan tidak selalu bersifat positif. Beberapa penelitian menemukan adanya kesenjangan kualitas tata kelola sekolah antar daerah sebagai akibat dari perbedaan kapasitas sumber daya manusia, kondisi ekonomi daerah, dan kemampuan manajerial lembaga pendidikan. Daerah yang memiliki sumber daya lebih baik cenderung mampu memanfaatkan kewenangan yang diberikan secara optimal, sedangkan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan pendidikan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan yang tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam tata kelola sekolah. Masih ditemukan sekolah yang mengalami kesulitan dalam perencanaan program, pengelolaan anggaran, maupun pelaksanaan evaluasi pendidikan akibat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan, tetapi juga oleh kesiapan institusi dan individu yang menjalankannya (Karjuni et al., 2026).

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah masih menjadi tantangan dalam implementasi desentralisasi pendidikan. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan pendidikan dan menghambat upaya peningkatan mutu sekolah. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi dapat digunakan secara efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola sekolah di Indonesia. Dampak positif yang muncul meliputi meningkatnya kemandirian sekolah, efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan pendidikan. Namun demikian, berbagai tantangan seperti ketimpangan kapasitas daerah, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya sistem pengawasan masih menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian agar tujuan desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

#### **4. Implikasi Kebijakan bagi Penguatan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia**

*”Berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian yang telah ditelaah, keberhasilan implementasi desentralisasi pendidikan tidak hanya bergantung pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem tata kelola pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian sekolah dan partisipasi masyarakat, masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian melalui kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.”*

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu implikasi kebijakan yang paling penting adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Berbagai penelitian menemukan bahwa kualitas kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, serta kemampuan manajerial tenaga kependidikan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik agar mereka mampu menjalankan fungsi manajerial dan akademik secara lebih efektif (Widayaningsih & Mulyono, 2026).

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dan sekolah harus diimbangi dengan mekanisme monitoring yang efektif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang baik akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya pendidikan.

Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa ketimpangan kapasitas antar daerah masih menjadi tantangan utama dalam implementasi desentralisasi pendidikan. Daerah yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat cenderung mampu menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk membantu daerah-daerah yang masih tertinggal melalui pemberian bantuan pendanaan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kebijakan tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan perlu terus diperkuat. Meskipun desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, pemerintah pusat tetap memiliki peran strategis dalam menetapkan standar nasional pendidikan, melakukan pembinaan, serta memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme

koordinasi yang jelas dan berkelanjutan agar kebijakan pendidikan di tingkat pusat dan daerah dapat berjalan secara harmonis dan saling mendukung.

Berbagai penelitian menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan. Keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif orang tua, komite sekolah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada penguatan kemitraan antara sekolah dan masyarakat melalui berbagai forum partisipatif yang memungkinkan masyarakat ikut berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi penguatan desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong digitalisasi tata kelola pendidikan melalui pengembangan sistem informasi manajemen sekolah, pengelolaan data pendidikan yang terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi dalam proses monitoring dan evaluasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah.

Penelitian yang dianalisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penguatan budaya mutu di lingkungan sekolah juga menjadi implikasi kebijakan yang penting. Desentralisasi pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian kewenangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah dan sekolah perlu membangun sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan melalui evaluasi diri sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Di samping itu, beberapa penelitian merekomendasikan perlunya kebijakan yang mendorong pengembangan kepemimpinan pendidikan yang adaptif dan inovatif. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan harus mampu menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang muncul dalam era globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, program pengembangan kepemimpinan pendidikan perlu menjadi prioritas dalam upaya memperkuat implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia (Fathih, 2026).

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan desentralisasi pendidikan memerlukan pendekatan kebijakan yang menyeluruh, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, pemerataan dukungan antar daerah, peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan budaya mutu di sekolah. Melalui berbagai kebijakan tersebut, desentralisasi pendidikan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas tata kelola sekolah, tetapi juga mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan bentuk reformasi tata kelola pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan pendidikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi telah mengubah pola pengelolaan pendidikan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi yang menyatakan bahwa pemberian kewenangan kepada pihak yang lebih dekat dengan masyarakat akan

menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Hasil penelitian Alya dan Hastuti menunjukkan bahwa sekolah dan pemerintah daerah memperoleh ruang yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi lokal sehingga proses pengelolaan pendidikan menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi bentuk implementasi desentralisasi yang paling dominan di Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bahwa sekolah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. Hasil penelitian Arifin menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi pendidikan mampu meningkatkan kemandirian sekolah dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan mampu memperkuat kapasitas sekolah dalam mengelola sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, keberhasilan implementasi desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Temuan penelitian mengenai dampak desentralisasi terhadap tata kelola sekolah menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian Dewi menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengelolaan pendidikan mampu meningkatkan keterbukaan sekolah dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pendidikan. Temuan ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan organisasi publik. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya tata kelola sekolah yang efektif dan bertanggung jawab.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan peluang yang lebih besar bagi sekolah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pembelajaran. Temuan Ridwan dan Sumirat menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki tingkat otonomi lebih tinggi cenderung mampu mengembangkan program unggulan, menciptakan metode pembelajaran yang inovatif, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa fleksibilitas yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi dapat menjadi faktor pendorong munculnya kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan. Dengan adanya kebebasan dalam mengelola sumber daya dan program sekolah, satuan pendidikan memiliki kesempatan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan lingkungan pendidikan yang terus berubah.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu temuan yang paling dominan adalah adanya kesenjangan kapasitas antar daerah dalam mengelola pendidikan. Beberapa daerah yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, dukungan anggaran yang memadai, dan kepemimpinan yang efektif mampu mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Sebaliknya, daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya sering mengalami kesulitan dalam mengelola kewenangan yang diberikan. Temuan Karjuni menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi manajerial dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor yang menyebabkan efektivitas desentralisasi pendidikan berbeda-beda

antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan desentralisasi apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah masih menjadi hambatan dalam implementasi desentralisasi pendidikan. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksinkronan kebijakan serta kurang optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Akibatnya, beberapa program pendidikan tidak berjalan secara maksimal dan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, peran pemerintah pusat tetap diperlukan sebagai regulator yang memastikan tercapainya standar mutu pendidikan nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan implikasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi pendidikan. Widyaningsih dan Mulyono menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, dan kemampuan manajerial tenaga kependidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola sekolah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi seluruh tenaga pendidikan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi dapat dimanfaatkan secara efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Selain penguatan sumber daya manusia, hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya pemerataan dukungan pendidikan antar daerah melalui kebijakan afirmatif. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah yang masih memiliki keterbatasan kapasitas agar kesenjangan mutu pendidikan dapat diminimalkan. Kebijakan berupa bantuan pendanaan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta pendampingan manajerial dapat menjadi solusi untuk memperkuat implementasi desentralisasi di daerah yang masih tertinggal. Dengan demikian, tujuan utama desentralisasi pendidikan untuk menciptakan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat tercapai secara lebih optimal.

Di samping itu, hasil penelitian Fathih menunjukkan bahwa pengembangan kepemimpinan pendidikan yang adaptif dan inovatif menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era globalisasi dan digitalisasi. Kepala sekolah tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam memimpin perubahan, mengelola inovasi, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, program pengembangan kepemimpinan pendidikan perlu menjadi bagian penting dari kebijakan penguatan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola sekolah melalui peningkatan kemandirian, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi pendidikan. Namun, keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, kemampuan kelembagaan, kualitas kepemimpinan, sistem pengawasan, dan dukungan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pengawasan yang efektif, serta pemerataan dukungan pendidikan menjadi langkah penting yang harus dilakukan

untuk memastikan bahwa tujuan desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara berkelanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan berbagai hasil kajian literatur, desentralisasi dan otonomi pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap tata kelola sekolah. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah dan satuan pendidikan memungkinkan sekolah untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan, transparansi dalam pengelolaan sekolah, serta akuntabilitas terhadap berbagai program pendidikan yang dilaksanakan.

Salah satu bentuk nyata penerapan desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui MBS, sekolah memperoleh keleluasaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Kondisi ini mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus membuka peluang bagi sekolah untuk mengembangkan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar.

Meskipun memberikan banyak manfaat, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan kapasitas antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan koordinasi menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan kualitas pengawasan, serta dukungan kebijakan yang adil dan merata agar tujuan desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

## Referensi

- Alya, N. A. F. I., & Hastuti, S. (2025). Otonomi Dalam Kepemimpinan Sekolah: Peluang, Tantangan, Dan Dampaknya Bagi Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Dan Pendidikan (Mantap)*, 2(3), 162–169.
- Arifin, S. (2025). Transformasi Mutu Madrasah, Menakar Peluang Dan Tantangan Di Tengah Dinamika Otonomi Pendidikan. *Geneologi Pai: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 196–206.
- Brereton, P., Kitchenham, B. A., Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons From Applying The Systematic Literature Review Process Within The Software Engineering Domain. *Journal Of Systems And Software*, 80(4), 571–583.
- Dewi, R. K., Sari, A. F., & Rahayu, S. S. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Di Indonesia: Dampak, Tantangan, Dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310.
- Fathih, M. A. (2026). Paradigma Manajemen Pendidikan Islam Dalam Kajian Studi Islam: Tinjauan Literatur Sistematis. *Ratio Divina: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 20–40.
- Indah, S., Frinaldi, A., Hendranaldi, H., & Magriasti, L. (2024). Implikasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4451–4460.
- Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Karjuni, A., Alirahman, A. D., & Suza, A. A. (2026). Strategi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Mutu Layanan Pendidikan. *Educhange: Educational Management Journal*, 1(1), 59–68.

- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The Prisma 2020 Statement: An Updated Guideline For Reporting Systematic Reviews. *Bmj*, 372.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter Jawara (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Rizka, A. F., Ramadhan, L. S., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Era Desentralisasi: Analisis Systematic Literature Review Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sektor Pendidikan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5452–5466.
- Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. *Journal Of Business Research*, 104, 333–339.
- Sui-Ni, N. (2023). Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045. *Arxiv Preprint Arxiv:2302.12837*.
- Ummaroch, R., Kurniadi, D., & Tinus, A. (2026). Harmonisasi Tata Kelola: Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Daerah Di Era Otonomi. *J-Ses: Journal Of Science, Education And Studies*, 5(1).
- Widayaningsih, W., & Mulyono, M. (2026). Studi Literatur: Tata Kelola Kurikulum Di Belanda: Ketegangan Antara Otonomi Sekolah, Standardisasi Nasional, Dan Ekuitas Pendidikan. *Polinomial: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(1), 306–312.